

BAB I

A. Latar Belakang

Kebutuhan dan keinginan manusia terus berkembang dan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, manusia harus bekerja untuk memperoleh pendapatan demi mencukupi kebutuhannya. Setelah memperoleh pendapatan, individu juga perlu mengelola pendapatan dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pengelolaan keuangan yang baik juga dapat membantu dalam membuat perencanaan jangka pendek maupun pada jangka panjang.

Pengelolaan keuangan dalam beberapa kurun waktu belakangan ini banyak diperbincangkan. Perhatian khusus terhadap literasi keuangan dikarenakan harapan suatu negara untuk memiliki penduduk yang memiliki kecerdasan dalam mengelolah keuangan yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi yang baik pada suatu negara. Setiap manusia harus memiliki suatu pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola finansialnya secara efektif demi kesejahteraan kehidupannya.

(2013:11) jasa keuangan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat akan lembaga keuangan serta produk dan jasanya. Pengelolaan keuangan berhubungan dengan bagaimana cara masyarakat tersebut dapat mengelolah dan melakukan perencanaan finansialnya sebaik mungkin. Menurut Lusardi dan Mitchell (2007) dalam Rosyid (2012), pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Ketidak pahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan dapat berdampak pada kurangnya akses masyarakat ke lembaga keuangan dan hal ini dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.

Tujuan dan literasi keuangan agar pendapatan yang diperoleh masyarakat nantinya akan berguna untuk kehidupan jangka panjangnya yaitu dengan menginvestasikan pendapatan tersebut untuk pendidikan maupun hal-hal produktif bukan hanya untuk hal-hal yang konsumtif. Pengelolaan keuangan sangat diperlukan dalam suatu negara untuk meningkatkan pembangunan suatu Negara.

Manfaat pengelolaan keuangan secara umum sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar masyarakat yang sudah mengetahui mengenai produk-produk dan jasa layanan lembaga keuangan yang ada. Hal yang sangat penting agar kedepannya pemerintah dapat menyusun program-program edukasi keuangan yang diperlukan oleh masyarakat. Dan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kurang atau bahkan tidak mendapatkan akses produk dan jasa keuangan diharapkan dapat memperoleh produk jasa keuangan yang terjangkau, mudah, dan sederhana namun memiliki manfaat yang berguna bagi kelompok masyarakat tersebut. Rapat terbatas tentang keuangan inklusif di kantor Kepresidenan, Jakarta pada Selasa 26 April 2016, Presiden Jokowi Mengatakan: “Hanya 21,84% dari total penduduk Indonesia yang memiliki pengelolaan atau kemampuan literasi keuangan yang baik. Data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank serta kepemilikan tabungan di lembaga keuangan formal”.

Pernyataan yang di utarakan oleh Presiden Joko Widodo di atas diketahui bahwa rendahnya pengelolaan keuangan menjadi salah satu sebab rendahnya angka partisipasi menabung masyarakat. Atas hal tersebut, Presiden meminta adanya terobosan baru terkait dengan perluasan jangkauan ke seluruh Indonesia tentang pendidikan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, sehingga angka partisipasi menabung masyarakat meningkat.

Hasil survey yang dilakukan OJK pada tahun 2016 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia sebesar 29,66%, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan hasil survey yang dilakukan otoritas jasa keuangan pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,84%. Survey dilakukan pada 9.680 responden yang tersebar di 34 Provinsi dan 64 kota/ kabupaten di seluruh Indonesia. Profil para responden meliputi Pegawai dan professional, Pengusaha, pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, tidak bekerja dan lainnya.

Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan tingkat pengelolaan keuangan yang paling tinggi yaitu sebesar 40%. Kemudian diikuti dengan provinsi Jawa Barat sebesar 38,70% sebagai posisi kedua, sedangkan posisi terendah dengan tingkat literasi sebesar 19% di duduki oleh provinsi Papua Barat.

Gamabar 1.1

Indeks Pengelolaan keuangan Provinsi di Indonesia



Sumber: 1.1 Indeks Pengelolaan keuangan Provinsi di Indonesia

<http://www.rappler.com/Indonesia/ekonomi/159498-ojk-literasi-keuangan-indonesia-2016> (diakses 10 Desember 2017).

Adanya perbedaan hasil survey literasi mengenai tingkat literasi keuangan di setiap daerah ditentukan oleh beberapa penyebab. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan informasi yang cukup dan di tunjang oleh fasilitas perbankan yang memadai, sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan tentang keuangan. Penyebab utama Permasalahan keuangan adalah ketakutan dan kebodohan bahkan ketidak pahaman, bukan hanya soal ekonomi, pemerintah, atau orang kaya hal ini dikemukakan oleh Kiyosaki (2000:44). Banyak orang yang menjadi korban penipuan berkedok investasi dikarenakan tergiur dengan pengembalian yang lebih tinggi dan tentunya hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan. (Fitriana, 2016). Sepanjang tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan telah menerima pemberitahuan serta aduan terkait dengan penipuan berkedok investasi

berjumlah sebanyak 283 kasus di Jawa tengah dan DIY. Oleh karena sebab itu pengelolaan keuangan sangat penting untuk menunjang pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk investasi dan manajemen keuangan pribadi perlu diketahui oleh masyarakat.

Hasil Survei yang dilakukan oleh Nasional Pengelolaan keuangan Indonesia pada tahun 2013 (www.sikapiuangmu.ojk.ac.id) menyatakan bahwa tingkat pengelolaan keuangan masyarakat di Indonesia masih sangat rendah. Hasil data dari Survei nasional Pengelolaan keuangan Indonesia tahun 2016 masyarakat Indonesia yang tergolong dalam well literate hanya sebesar 21,84% pada tahun 2013, dan mengalami peningkatan 7,82% menjadi 29,66% pada tahun 2016. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan keuangan mengalami kenaikan hanya 7,82%. Beda halnya dengan hasil Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesai yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Pendapatan masyarakat jika tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik maka akan menimbulkan permasalahan. Hal ini bisa dilihat dari hasil survey Neraca Rumah Tangga (2011) menunjukkan bahwa presentase sebesar 48% rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan. Dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak memiliki tabungan dilembaga keuangan formal maupun non formal masih relative tinggi yaitu 52% . (Booklet Keuangan Inklusif 2014). Hasil ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara Asia, misalnya Negara Malaysia yang telah mencapai 81% dari total jumlah penduduk nya. Sedangkan Negara Thailand sebesar 78% dan Singapura mencapai hingga 96%. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat di negara tersebut mampu memahami produk dan lembaga jasa keuangan serta dapat menerapkannya dalam kehidupannya.



Sumber : Booklet Keuangan Inklusif 2014

Berdasarkan presentase di atas telah menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan masyarakat di Indonesia relative rendah, dan akses produk dan jasa ke lembaga keuangan pun juga rendah. Pemerintah pun telah berupaya untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan dengan “empat cara” yang dapat meliputi :

1. perluasan jangkauan perbankan dan keuangan formal,
2. meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengakses perbankan,
3. Perlindungan terhadap konsumen
4. Meningkatkan layanan Jasa Keuangan terutama bagi UMKM

Strategi yang telah disusun oleh otoritas jasa keuangan merupakan strategi nasional Pengelolaan keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia namun upaya ini masih kurang dan masih sangat memerlukan perhatian khusus pemerintah agar masyarakat yang kurang bahkan belum dapat mengakses produk dan jasa lembaga keuangan dapat diakses secara mudah.

Hasil survey yang dilakukan OJK diketahui bahwa tingkat pengelolaan keuangan pada masyarakat tergolong masih rendah. Dengan rendahnya pemahaman keuangan ini, masyarakat

sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan melalui investasi yang berkedok palsu. Laporan yang berkaitan dengan penipuan investasi ilegal telah banyak dilaporkan oleh masyarakat. Penipuan ini dilakukan Karena masyarakat yang telah tertipu belum sepenuhnya paham mengenai produk keuangan yang diperjual belikan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tertipu dengan banyak kasus yang serupa. Seperti yang di kutip dalam suatu berita: “Sepanjang tahun 2016, Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK dan unsur-unsur terkait memperoleh 438 laporan investasi ilegal. Jumlah laporan yang diterima Satgas Investasi terdiri atas 120 entitas. Namun, dari 120 entitas yang diindikasikan melakukan penipuan, hanya 30 entitas yang dapat ditangani Satgas. Hal ini karena sebagian besar identitas entitas tidak lengkap sehingga sulit ditelusuri. Dari investasi ilegal ini Satgas menemukan adanya kerugian masyarakat yang cukup besar. Salah satu kerugian akibat investasi ilegal dari Pandawa Group, Kapolda Metro Jaya mengindikasikan kerugian masyarakat hingga Rp 3 triliun”

Pernyataan yang disampaikan otoritas jasa keuangan diketahui bahwa terdapat banyak kasus penipuan yang berhubungan dengan investasi kebanyakan kasus tersebut tidak dapat ditangani karena kurangnya informasi mengenai profil pelaku penipuan. Hal ini tentu menimbulkan dampak dan kerugian bagi masyarakat. Salah satu kerugian yang dialami oleh masyarakat yaitu dana yang memiliki nilai yang cukup besar. Kecenderungan masyarakat Indonesia yang menginginkan segala sesuatu dapat diperoleh dengan cepat termaksud dengan *return* investasi yang dihasilkan, menyebabkan para masyarakat menyampingkan nalar atau akal sehat untuk menangani lebih dalam profil perusahaan yang menawarkan bentuk investasi .

Dari berbagai macam kasus yang telah dijelaskan diatas, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman keuangan atau pengelolaan keuangan yang baik dan melakukan kontrol dan mengendalikan diri terhadap keputusan untuk melakukan investasi, menabung atau

memanfaatkan produk perbankan lainnya. Agar tidak terjadi kerugian yang pada nantinya akan menimbulkan keuntungan bagi pihak pelaku penipuan dan merugikan masyarakat.

Edukasi keuangan, pemahaman akan pengelolaan keuangan sangat diperlukan di masyarakat kalangan bawah atau bisa disebut masyarakat marginal. Masyarakat marginal sendiri berasal dari bahasa Inggris "marginal" yang berarti jumlah atau efek sangat kecil. Artinya Marginal merupakan suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga dikatakan sebagai kelompok pra-sejarah. Marginal juga identik dengan masyarakat kecil atau masyarakat yang terpinggirkan (masyarakat kelas bawah).

Masyarakat marginal sering tersisih dari pembangunan sehingga masyarakat kurang atau bahkan tidak bisa menikmati pembangunan. Penyandang disabilitas, buruh migrant, kelompok asongan, Pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima termaksud dalam kelompok marginal. Kelompok-kelompok ini khususnya pedagang kaki lima bisa dikatakan unbankable atau bisa disebut masyarakat yang belum bisa mengakses ke lembaga keuangan dan kurang mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan bank maupun non bank.

Pedagang kaki lima yang merupakan (sector informal) dimana pedagang atau mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum, seperti teretuar, pinggir-pinggiran jalan umum dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapannya mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha seperti kegiatan pedagang-pedagang kaki lima yang berada di Jln. Malioboro atau pusat pembelanjaan Malioboro.

Tabel 1.1

Tabel Jumlah PKL berdasarkan Organisasi, Lokasi dan Jenis Dagangan

No	Organisasi/Paguyuban	Jumlah	Jenis Dagangan	Lokasi
1	Paguyuban perajin, pelukis dan pedagang kaki lima Malioboro (PEMALIN)	398	Barang dagangan berukuran besar pakaian, batik, kerajinan tangan, lukisan, tas dan perabot	Sisi timur jalan antara Mall pasar Beringharjo, di jalur yang menghadap dan membelakangi toko sisi barat jalan
2	Koperasi Persatuan pedagang kaki lima Yogyakarta	154	Makanan dan Minuman	Di depan Pasar Beringharjo
3	Pedagang angkringan Malioboro ahmad Yani	169	Makanan dan Minuman	Tersebar di sepanjang bahu jalan Malioboro
4	Kios Warung dan lesehan (kwl) Malioboro	48	Makanan dan Minuman	Tersebar di sepanjang bahu jalan Malioboro
5	Handayani	39	Bakso	Tersebar di sepanjang bahu jalan Malioboro, termasuk di depan kantor instansi pemerintah
	Jumlah	808		

Sumber:UPT Malioboro, 2014

Dilihat dari table di atas bahwa jumlah pedagang aksesoris dan pakaian menduduki tingkat pertama dengan jumlah pedagang sebanyak 398 Pedagang, diikuti dengan jumlah pedagang Makanan dan Minuman yang terdapat di sisi bahu jalan Malioboro.

Pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman mempunyai pendapatan yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang kaki lima yang mempunyai produk lainnya, karena makanan dan minuman sangat dibutuhkan oleh para wisatawan untuk memenuhi kebutuhan perut manusia meskipun harga makanan dan minuman berbeda atau cenderung lebih mahal namun tetap saja peminatnya atau permintaannya cukup tinggi bagi para pengunjung ataupun parawisatawan.

Dengan adanya PKL yang semakin besar dan menjual produk tentunya sangat mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan yang didapatkan oleh PKL. Untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat PKL mengenai perencanaan keuangan perlu adanya edukasi dan pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan. Dengan alasan banyak PKL yang

memiliki latar belakang yang minim terhadap kemampuan pengelolaan keuangan Sehingga edukasi finansial (financial education) sangat dibutuhkan dikalangan para Pedagang kaki lima.

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan, dimana setiap orang yang mempunyai pengelolaan keuangan yang rendah, menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan keuangan, tabungan, pinjaman, investasi, rencana pension, dan seterusnya. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas terkait pentingnya pemahaman akan pengelolaan keuangan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat ataupun masyarakat marginal khususnya pedagang kaki lima di pasar Malioboro, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan (*Financial literacy*) pada pedagang kaki lima di pasar Malioboro dengan judul “ **Uji Beda Pengelolaan keuangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang sudah dituliskan, telah didapat beberapa rumusan masalah mengenai pengelolaan keuangan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta.

- a. Adakah perbedaan pengelolaan keuangan pada masyarakat pada Pedagang kaki Lima di pasar Malioboro Yogyakarta, berdasarkan Usia?
- b. Adakah perbedaan pengelolaan keuangan pada masyarakat Pedagang Kaki Lima di pasar Malioboro Yogyakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan ?
- c. Adakah perbedaan pengelolaan keuangan pada masyarakat Pedagang Kaki Lima di pasar Malioboro Yogyakarta berdasarkan tingkat Pendapatan?
- d. Adakah perbedaan pengelolaan keuangan pada masyarakat Pedagang Kaki Lima di pasar Malioboro Yogyakarta berdasarkan Kepemilikan Akun Rekening ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. Untuk mengetahui perbedaan pengelolaan keuangan pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Malioboro Yogyakarta, berdasarkan Usia.
- b. Untuk mengetahui perbedaan literasi keungan pada masyarakat Pedagang Kaki Lima di pasar Malioboro Yogyakarta, berdasarkan Tingkat Pendidikan.
- c. Untuk mengetahui perbedaan literasi keungan pada masyarakat Pedagang Kaki Lima di pasar Malioboro Yogyakarta, berdasarkan Tingkat Pendapatan.
- d. Untuk mengetahui perbedaan literasi keungan pada masyarakat Pedagang Kaki Lima di pasar Malioboro Yogyakarta, berdasarkan Kepemilikan Akun Rekening.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Kelompok Pedagang Kaki Lima di Pasar Malioboro Yogyakarta, sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan keuangan.
- b. Pemerintah dan perbankan, sebagai referensi agar dapat membantu penyediaan produk dan jasa keuangan Pedagang Kaki Lima.
- c. Akademisi, sebagai literature untuk membuat makalah, penelitian atau skripsi selanjutnya.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada masyarakat pedagang kaki lima di pasar Malioboro Yogyakarta. Dan untuk meneliti adanya perbedaan pengelolaan keuangan berdasarkan, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kepemilikan akun rekening.